

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memajukan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk karakter individu, memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, keterampilan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara.”

Pendidikan telah menjadi salah satu elemen kunci dalam meraih kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, Pendidikan menjadi satu hal yang harus di prioritaskan karena dapat menentukan keberhasilan suatu bangsa untuk bersaing secara global. Sebagai syarat mutlak, pendidikan harus dipenuhi agar suatu bangsa dapat memenangkan persaingan global.

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 yang membahas tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, terdapat ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan Pendidikan di daerah. Aturan tersebut tertera dalam pasal 3A yang menegaskan bahwa “Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun undang-undang dan peraturan pemerintah telah menjamin hak Pendidikan untuk seluruh warga negara, masih banyak warga Indonesia yang sulit mengakses Pendidikan karena faktor kemiskinan. Artinya, niat pemerintah untuk memberlakukan wajib sekolah belum sepenuhnya terwujud. Bagi masyarakat kelas

menengah kebawah, keuangan untuk pendidikan selalu menjadi perhatian utama. Warga miskin seringkali merasa terbebani untuk membiayai Pendidikan sehingga mereka lebih sulit mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta aksesibilitas pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu, kurangnya keterampilan masyarakat dan pilihan pekerjaan yang terbatas berkontribusi pada kemiskinan dan pengangguran. Tingkat sumber daya manusia harus ditingkatkan. Salah satu cara pemerintah bekerja untuk memberikan pilihan paling banyak kepada penduduk untuk mendapatkan layanan pendidikan adalah melalui program yang dilakukan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang luas kepada masyarakat adalah melalui Program Kecakapan Kerja. Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kompetensi mereka di bidang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Program ini ditujukan bagi mereka yang ingin memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja, pemerintah berupaya untuk menjadi mitra bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Diharapkan program bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keterampilan seperti biaya transportasi dan perlengkapan pembelajaran, serta uang saku. Dengan adanya Program Kecakapan Kerja, diharapkan bahwa hal ini dapat membantu mengurangi jumlah peserta didik yang terpaksa putus sekolah karena terkendala masalah biaya. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk tunai kepada seluruh masyarakat dari keluarga kurang mampu atau masyarakat yang ingin menambah keterampilan.

Dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 diantaranya mengamatkan tentang Program Keterampilan Kerja tertera dalam Pasal 2 Ayat 4 “Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian meliputi: a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. lembaga swadaya masyarakat; d.

lembaga pendidikan dan pelatihan; e. lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di daerah; dan f. lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan”.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat 4, mencantumkan dua satuan pendidikan nonformal: Lembaga Kursus dan Lembaga Diklat. Pasal 26 ayat 5 menjelaskan secara umum bahwa program pelatihan dan kursus ditawarkan kepada individu yang membutuhkan bekal pengetahuan, bakat, dan keterampilan hidup untuk tumbuh secara pribadi, profesional, mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan lebih lanjut.

Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 (pasal 103, ayat 1), yang berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan pendidikan, kursus dan pelatihan disediakan bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan karakter profesional dan kemahiran vokasi peserta. Kurniawan (2015) mengungkapkan bahwa: “Di era globalisasi manusia dituntut memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian orang memilih bekerja menjadi seorang karyawan perusahaan. Sebagian lagi memilih untuk mendirikan usaha sendiri atau berwirausaha. Manusia memerlukan keterampilan agar bisa membuka peluang usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain terutama pada kaum perempuan yang kebanyakan bergantung kepada laki-laki. Perempuan membutuhkan keterampilan agar mampu menambah penghasilan laki-laki. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah proses pemberdayaan perempuan agar perempuan menjadi kaum yang tidak sepenuhnya bergantung kepada laki-laki dan mampu menambah penghasilan keluarga”.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi melalui pelatihan dan pendidikan, sangat penting bagi pengusaha untuk menjadi lebih mandiri (Life Skills). Keberhasilan pembangunan akan meningkat jika pengusaha pencipta lapangan kerja mendukungnya. Faktanya, sejumlah besar orang tidak memiliki keterampilan, antusiasme, atau dana untuk memulai bisnis; Banyak juga yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan menganggur. Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang memenuhi persyaratan masyarakat diperlukan

untuk mengatasi masalah ini dan memungkinkan pengangguran menemukan peluang kerja atau mengejar aktivitas mandiri.

Istilah "keterampilan hidup" mengacu pada program pendidikan yang berhubungan dengan pelatihan atau keterampilan penduduk belajar yang siap untuk tenaga kerja atau yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tujuan dari pelatihan keterampilan kerja kecantikan kulit adalah untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan efisiensi proses pelatihan di lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan dengan memberikan acuan dalam penyampaian materi pelatihan teori, praktik, dan implementasi. Peningkatan kualitas hasil pelatihan ditentukan oleh meningkatnya pencapaian komponen tujuan pelatihan dan semakin tingginya nilai pragmatis materi yang dapat dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya peserta pelatihan. Mengingat persyaratan yang disebutkan sebelumnya, pelatihan keterampilan kerja kecantikan kulit berupaya memberikan informasi, perspektif, dan kemampuan yang mereka butuhkan kepada penduduk setempat untuk meningkatkan standar hidup mereka melalui kemajuan sektor ekonomi.

Lembaga Kursus dan Pelatihan Yuwita Kota Tasikmalaya merupakan fasilitas kursus dan pelatihan di Kota Tasikmalaya yang juga melaksanakan Program Pendidikan Keterampilan Kerja (PKK). Program pelatihan keterampilan yang disebut Riasan Pengantin, Kecantikan Rambut, Tata Rambut, dan Kecantikan Kulit ditawarkan oleh LKP Yuwita Kota Tasikmalaya.

Kategori aktivitas Skin Beauty adalah salah satu yang sangat diminati oleh penduduk setempat LKP Yuwita. Diyakini bahwa program pendidikan keterampilan kerja LKP Yuwita Kota Tasikmalaya akan membantu peserta pelatihan mengembangkan pola pikir yang mandiri dan cakap sehingga setelah lulus, mereka dapat memasuki dunia kerja dan menafkahi keluarga atau diri mereka sendiri. Sebanyak 35 orang peserta didik mengikuti program bantuan ini, program ini diperuntukan untuk masyarakat umum yang ingin menambah keterampilan, dan masyarakat yang kurang mampu yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran dengan usia antara 17-25 tahun. Namun pada kenyataannya, program yang telah diterapkan belum menghasilkan hasil terbaik. Sementara itu, Kesulitan

penempatan kerja di LKP Yuwita muncul akibat minimnya Kerjasama aktif dengan industri kecantikan local, kurangnya jaringan yang memadai untuk menyediakan peluang magang atau kerja, dan tantangan dalam menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan pasar kerja, menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan program pelatihan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah jumlah peserta didik yang sudah menyelesaikan pelatihan tersalurkan kerja oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Yuwita dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk memperoleh Program Pendidikan Kecakapan Kerja.

Penelitian ini penting dilaksanakan karena terkait dengan pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kerja ini sebagai beasiswa yang berfungsi mendukung universalitas Pendidikan menengah atau kesempatan yang sama dalam layanan Pendidikan berkualitas. Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pemangku kepentingan khususnya Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota mampu membuat kebijakan yang tepat dalam mengontrol implementasi Pendidikan Kecakapan Kerja agar tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan dengan perlu pertimbangan karena banyaknya peserta pelatihan yang menerima beasiswa dan rekomendasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja dari dinas.

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul dan meneliti tentang **“Implementasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tata Kecantikan Kulit Bantuan Dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi”** yang terdapat di Kota Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, yaitu :

- a. Implementasi program bantuan pelatihan yang diberikan pemerintah belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh Lembaga Penerima bantuan.
- b. Kerjasama minim dengan industri/kemitraan yang erat dengan bisnis kecantikan setempat.

- c. Kurangnya jaringan penempatan kerja untuk memfasilitasi penempatan kerja atau magang bagi siswa.
- d. Tidak memadainya persiapan peserta didik untuk pekerjaan.
- e. Tidak adanya system monitoring penempatan kerja.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada Implementasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja Keterampilan Tata Kecantikan Kulit oleh Lembaga Kursus Yuwita. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja di Lembaga Kursus dan Pelatihan Yuwita?
2. Bagaimana Keterampilan Tata Kecantikan Kulit di Lembaga Kursus dan Pelatihan Yuwita?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui Implementasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja di Lembaga Kursus dan Pelatihan Yuwita.
2. Mengetahui Keterampilan Tata Kecantikan Kulit di Lembaga Kursus dan Pelatihan Yuwita.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan bisa digunakan dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk membantu meningkatkan ilmu Pendidikan Masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelaksanaan program pelatihan.
2. Untuk memberikan ilmu, pemahaman, dan penjelasan tentang implementasi program Pendidikan kecakapan kerja tata kecantikan kulit bantuan dari direktorat jendral vokasi.

3. Sebagai acuan, pertimbangan, ataupun pengembangan untuk penelitian yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Warga Belajar

Sebagai informasi yang dapat digunakan warga untuk melanjutkan pendidikan mereka selama proses pembelajaran. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber daya yang berharga untuk kemajuan pemahaman dan perspektif mengenai program pelatihan yang dirancang untuk mendidik penduduk. Warga yang menerima pelatihan kecantikan kulit juga akan mendapat manfaat dari belajar bagaimana memenuhi tuntutan pekerjaan mereka di era digital ini.

2) Bagi Instruktur

Sebagai panduan saat mempraktikkan program pelatihan dan saat melakukan pelatihan di masa depan sehingga melampaui pelatihan sebelumnya.

3) Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan

Manajemen institusi mungkin merasa berguna sebagai referensi, terutama ketika mempraktikkan Pendidikan Keterampilan Kerja, sebagai komponen dari pembentukan atau penyelenggaraan program yang berkaitan dengan penerapan pendidikan kecakapan hidup.

4) Bagi Penulis

Ini bisa menjadi sumber daya yang bermanfaat untuk administrasi kelembagaan, terutama ketika pendidikan kelayakan kerja sedang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan atau pelaksanaan inisiatif yang terkait dengan penerapan pendidikan kecakapan hidup.

5) Bagi Pemerintah

Penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempraktikkan program pelatihan. Hasil penelitian ini menjadi acuan untuk memperbaiki dan mengembangkan program pelatihan, melalui pengambilan kebijakan yang disesuaikan dengan hasil penelitian tersebut.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan variabel-variabel penelitian yang akan diteliti untuk menghindari kesalahpahaman pada istilah-istilah yang ada didalam bahasan penelitian.

a. Implementasi Program

Implementasi Program Merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam proses pelaksanaan program pelatihan yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi program dapat dilihat dari realisasi program apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

b. Pendidikan Kecakapan Kerja

Pendidikan kecakapan kerja (PKK) merupakan program Pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kerja yang memenuhi kebutuhan dunia usaha, industry, dan dunia kerja (DUDIKA). Program PKK ditawarkan sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh kompetensi pada bidang kompetensi tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi agar dapat bekerja dan diterima di DUDIKA.

c. Keterampilan Tata Kecantikan Kulit

Keterampilan tata kecantikan kulit adalah program pendidikan yang membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat dan meningkatkan kesehatan kulit. Ini mencakup topik seperti perawatan kulit dasar, aplikasi produk perawatan, penanganan masalah kulit, dan teknik kecantikan. Peserta biasanya diajarkan tentang berbagai produk perawatan kulit, prosedur perawatan wajah, serta prinsip-prinsip dasar kecantikan kulit untuk dapat memberikan layanan yang profesional kepada klien.

d. Lembaga Kursus dan Pelatihan

Adalah lembaga yang terdapat beberapa keterkaitan nyata antara normal, nilai, dan keyakinan, serta fokus pada tuntutan sosial, serta sejumlah kegiatan yang krusial dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang dimaksud oleh lembaga tersebut. untuk melaksanakan program lembaga sendiri telah menyelenggarakan kursus dan pelatihan yang merupakan tata cara pembelajaran dari segi pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran tersebut lebih mengutamakan praktek karena lebih dalam untuk pembelajaran dibandingkan teori, sehingga menghasilkan pembelajaran yang cukup cepat dan fokus pada hasil.